## Nussella it



## Belum Setahun,

## Jalan Program GGS Ambrol

Jalan yang dikerjakan secara swakelola ini telah diserahterimakan ke masyarakat sehingga anggaran perbaikan sudah diusulkan oleh pihak desa.

BANGLI, NusaBali

Belum genap setahun sejak pembangunannya, ruas jalan yang digagas lewat program Gerbang Gita Santhi (GGS) di Tempek Barong, Desa Landih, Ke-



NUSABALI/DEWA

Kondisi jalan yang dibangun program GGS yang jebol di Desa Landih.

camatan Bangli, telah jebol dan malah membahayakan warga pengguna jalan. Diduga jebolnya

jalan ini akibat kualitas proyek yang buruk dengan kurang kuatnya konstruksi gorong-gorong di

bawah aspal lapen tersebut. Jalan jebol ini sangat mengganggu masyarakat, karena rawan terjadinya kecelakaan.

Untuk menghindari jatuhnya korban, warga menaruh batu ukuran besar di lokasi jebol. "Kalau tidak di taruh batu di sini, kita sering lupa kalau jalan ini jebol, sehingga sering menjebak pengendara," ujar warga setempat yang namanya enggan ditulis.

Sementara Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Desa Landih, I Putu Sedan saat dikonfirmasi, membenarkan jalan tersebut jebol sejak beberapa waktu lalu. Kondisi ini akibat kurang kuatnya kontruksi gorong-gorong. "Jalan ini dulu dirabat melalui program PNPM, begitu pula dengan goronggorongnya," ujarnya, Senin (7/9).

Dengan jebolnya jalan tersebut, kata dia, pihaknya bakal meng-koordinasikannya kepada kepala desa. Pasalnya, jalan yang dikerjakan secara swakelola ini telah diserah terimakan ke masyarakat. Untuk anggaran perbaikan ini sudah diusulkan oleh pihak desa, kalau tidak masuk anggaran perubahan kemungkinan anggaran induk akan kembali diusulkan. "Kita berharap agar jalan tersebut bisa segera dibenahi," pintanya.

Disinggung soal anggaran

Disinggung soal anggaran pembangunan jalan aspal itu, jelas Sedan, pembuatan jalan ini mendapatkan anggaran dari APBD melalui program GGS sebesar Rp 150 juta, kemudian ditambah dana swadaya masyarakat Rp 50 juta, sehingga total dana pembangunan Rp 200 juta. (200 juta)

Edisi : Selosa, 8 Sept 2015

Hal :\_\_\_\_

## NusaBali



# Dewan Setujui RAPBD Perubahan



HUMAS PEMKAB TABANAN

PENJABAT Bupati Tabanan Wayan Sugiada (tengah) dan Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi (kanan) bubuhkan tanda tangan usai sidang paripurna di gedung DPRD Tabanan, Senin (7/9).

TABANAN, NusaBali

DPRD Tabanan melalui rapat paripurna menyetujui Rancangan APBD Perubahan Tabanan tahun 2015, Senin (7/9). Selanjutnya, RAPD Perubahan tersebut diajukan ke Pemprov Bali untuk dievaluasi dan diverifikasi.

Penjabat Bupati Tabanan Wayan Sugiada menyampaikan terima kasih karena RAPBD Perubahan tersebut telah dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Sugiada berharap, tahapan evaluasi dan verifikasi di Pemprov Bali secepatnya membuahkan hasil. Sehingga RAPBD Perubahan yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD bisa ditetapkan agar seluruh program yang dianggarkan bisa dilaksanakan.

Diterangkan, penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam RAPBD Perubahan sebesar Rp 264 miliar lebih. Anggaran pada pos pendapatan itu terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 92,974 miliar, retribusi sebesar Rp 42 miliar, dan PAD lain-lainnya yang

sah sebesar Rp 121,658 miliar dari jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 1,596 triliiun.

Sedangkan untuk besaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1,702 triliun terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 561,616 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,140 triliun. "Ini berarti pada Rancangan APBD Perubahan terdapat defisit. Besarnya defisit itu direncanakan akan ditutupi dari SILPA (sisa lebih pagu anggaran) 2014," imbuh Sugiada.

Sugiada menyadari selama ini masih ada kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. "Kondisi ini memberikan tekanan pada rancangan APBD 2015 dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas dan program yang dibutuhkan," jelasnya. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya dengan sumber daya yang ada mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. 🖮 k21

Edisi : Selasa, & Septemberzois
Hal : 7

## Nusa Bali



#### Pembangunan Gedung di SMKN 1 Bangli Tersendat



KONDISI Gedung SMKN 1 Bangli yang baru setengah jadi, Senin (7/9)

BANGLI, NusaBali

Pembangunan gedung senilai miliaran rupiah di SMKN 1 Bangli, belum selesai hingga saat ini. Pasalnya gedung berlantai tiga yang dibangun mulai tahun 2014 lalu itu hingga kini belum ada kejelasan kelanjutanya. Tersendatnya pembangunan tersebut, akibat pihak rekanan sebelumnya dikenakan sanksi oleh Pemprov Bali. Tentu saja, kondisi bangunan yang setengah jadi ini menjadi pemandangan yang kurang mengenakkan bagi sekolah itu sendiri.

Kepala SMKN 1 Bangli, I Gede Aster, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, tidak menampik realita tersebut. Kata dia, pihaknya menerima pembangunan itu dari Pemprov Bali tahun 2014 lalu. Namun dalam perjalanan pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan pembangunan gedung senilai Rp 1, 625 miliar tersebut. Hingga akhirnya pihak rekanan yang menggarap pembangunan gedung itu dikenai sanksi blacklist. "Pihak rekanan katanya sudah dikenakan sanksi oleh Pemrov Bali," jelas Aster, Senin (7/9).

Sejatinya pembangunan ini sempat mau dilanjutkan dengan memasang atap bangunan menggunakan kontruksi baja. Namun, pihak konsultan melarang. Pasalnya kontruksi bangunan belum kuat dipasangi atap. Semenjak itu, pembangunan belum ada kelanjutan hingga sekarang. "Memang sempat ada rencana untuk memasang atap, tetapi karena kontruksi bangunan belum kuat maka dibatalkan," bebernya.

Berkaitan dengan nasib bangunan tersebut, pihaknya sudah mengadakan koordinasi ke pihak Disdikpora Bali. Pihak Disdikpora Bali berjanji bakal melanjutkan pembangunan pada tahun anggaran 2016 nanti. "Kita berharap supaya pembangunan gedung tersebut, dapat secepatnya selesai. Selain merupakan kebutuhan, juga rasanya kurang enak kalau dipandang jika kondisi bangunan seperti sekarang ini," harapnya.

Mengenai peruntukan bangunan, kata Aster, sesuai rencana untuk lantai dasar bakal dimanfaatkan untuk lahan parkir, lantai II bakal digunakan untuk laboratorium TKJ, Pemasaran dan ruangan administrasi. Sementara lantai III digunakan untuk aula. "Sementara untuk bangunan itu belum selesai, untuk itu kami masih menggunkan lab lama yang tentu kurang representatif. Supaya lebih sinkron, coba rekan-rekan media konfirmasi ke Disdikpora Bali," ujarnya. 🖮 cr53

Edisi : Gelaxin & Sept John Hal : \_ B\_\_\_\_

## NusaBall



#### Pencairan Dana Desa Tertahan di Daerah

JAKARTA, NusaBali

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyebut sekitar 60 persen dari 74.093 desa belum menerima dana desa. Masalah birokrasi dinilai jadi penghambat pengucuran dana tersebut.

Marwan mengatakan, pemerintah pusat telah mengucurkan 100 persen dana desa ke Kabupaten Kota. Namun dana itu masih banyak yang tertahan dengan alasan masalah birokrasi. "Sekarang problemnya dari kabupaten kota ke desa-desa. Itu problemnya bukan di sini (pusat) lagi. Biasalah bupati-bupati ini, lama banget, kita udah ubek-ubek, kita udah ketemuan. Minggu ini aku adakan pertemuan nasional lagi. Mereka ini tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, sehingga tidak segera disalurkan," jelas Marwan.

Marwan menjelaskan, ada beberapa kepala daerah yang memerintahkan kepala desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum dana desa itu disalurkan. Marwan menilai seharusnya RPIM-desa dan APB-desa itu tidak perlu terlalu banyak, namun harus bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau mereka minta aturan yang njilimet, bakal lama. Kita buat satu lembar saja, sudah mencakup semuanya. Yang penting penggunaannya bisa cepat," kata Marwan dilan-sir detikcom. "Presiden ingin birokrasi seperti ini dipangkas. Biar cepat," tambah Marwan.

Terkait itu, 3 menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu akan menjelaskan soal tata cara penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa dan mempermudah penggunaan dana desa. "Kita tetap lakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah, bupati, dan wali kota. Minggu ini kita buat SKB 3 menteri, yakni Mendes, Mendagri, dan Menkeu untuk revisi semua aturan yang ada, sehingga payung hukum cuma satu, sehingga memudahkan pencairan dana itu," jelas Marwan. "Presiden beri instruksi segera dipercepat untuk pencairan dana desa di Menkeu, Mendagri, Mendes. Maka minggu ini SKB jadi untuk percepat peny-

aluran dana desa," tambahnya.
Sementara Plt Pimpinan KPK,
Indriyanto Seno Adji menegaskan, jika memang benar yang
disebutkan Marwan, ada yang
menghabat pencairan dana desa
lebih baik dilaporkan ke penegak
hukum, termasuk KPK. "Penahanan dana desa harus dikaji
dulu apa kerugian negara. Kalau
ada penyalahgunaan wewenang
maupun potensi kerugian negara, sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum saja," kata
Indriyanto.

Marwan Jafar memang menyebut bahwa di beberapa daerah, dana desa sengaja ditahan untuk kepentingan Pilkada. Jika punya bukti, alangkah baiknya kalau Marwan segera melapor. "Tidak selalu harus melapor ke KPK, bisa juga ke penegak hukum lain," jelas Indriyanto.

Edisi : Jelara', 8 September 2015
Hal : 14

## Nusa Bali



#### Proyek Penataan Muara Tukad Mati

### Badung Minta Sepanjang 1.700 M dan Lebar 50 M

MANGUPURA, NusaBali

Usulan perubahan blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan untuk memuluskan proyek pembangunan long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, mulai terkuak. Pemkab Badung konon dalam draf yang akan diajukan ke Pemprov Bali meminta luasan sesuai proyek yang digarap dengan dana APBD Badung senilai Rp 47 miliar. Yang diminta dilakukan perubahan sepanjang 1.700 meter dengan lebar 50 meter.

"Dalam perubahan blok itu telah tercantum hanya untuk normalisasi. Tidak ada hal-hal lain selain penyelesaian normalisasi Tukad Mati," ucap Penjabat (Pj) Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka, usai menghadiri penandatanganan naskah kerja sama antara DPRD Badung dengan Kejaksaan Negeri Denpasar, di gedung DPRD Badung, Senin (7/9).

Karena yang dimohonkan hanya sesuai dengan proyek yang sekarang dikerjakan, Yudha Saka memastikan selebihnya kawasan taman hutan (tahura) tetap menjadi blok perlindungan. Menjawb kekhawatiran banyak jika perubahan zona itu memberikan peluang bagi investor membangun di kawasan tersebut, pejabat asal Buleleng ini memastikan hal itu tidak akan terjadi. Mengingat perubahan yang diajukan hanya untuk normalisasi muara Tukad Mati, bukan yang lainnya

Mati, bukan yang lainnya.

"Apabila ada pembangunan lainnya, itu adalah sebuah pelanggaran. Karena itu adalah zona perlindungan. Jadi tidak ada hal-hal lain selain untuk menyelesaikan proyek normalisasi," tegasnya. Yudha Saka menambahkan akan segera menyampaikan surat kepada gubernur, untuk secepatnya dilakukan perubahan blok di kawasan tahura tersebut.

Beredar kabar, usulan Pemkab Badung sekaligus menyertakan aspirasi dari Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Kuta. Isi asprasi masyarakat tersebut tertuang dalam surat No 010/MA-KUTA/IX/2015, ditekankan perubahan blog perlindungan menjadi blog pemanfaat khusus pada rencana pembangunan long storage.

Ketua Majelis Alit Desa Pakraman

Ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Kuta Wayan Swarsa, saat dihubungi mengakui aspirasi masyarakat yang dituangkan kwat MAPD Kuta. Ditegaskannya, aspirasi itu sematamata untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan lain. Apalagi menyerempet soal reklamasi.

"Surat itu tidak ada hubunganya dengan reklamasi, karena sudah jelas yang disepakati adalah penanggulangan sampah dan bencana banjir," katanya kepada wartawan kemarin.

Meski begitu, belakangan terungkap dari enam desa adat, ada yang menolak untuk menandatangani surat tersebut. Desa adat yang menolak itu adalah Desa Adat Kelan. "Satu desa adat yakni Kelan menolak untuk menandatangani surat tersebut. Jadi masih belum mewakili aspirasi MADP," katanya.

Bendesa Adat Kelan I Made Sugita saat dikonfirmasi membenarkan menolak menandatangani surat kesepakatan tersebut "Saya sempat menandatangani surat itu, tapi karena tahu surat tersebut isinya mengubah blok pemanfaatan tahura, dukungan saya cabut," ucap dia. Namun Sugita tidak memberikan penjelasan lebih lanjut perihal sikap penolakannya. 📹 as

Edisi : Selara, & September 2015

Hal : \_\_\_\_\_